

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdussalam, H. R., *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2008.
- Aloewie, T. F., *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*, Cetakan ke-11, Jakarta: BPHN, 1996.
- Amin, R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Andreae, S. J. F., *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1948.
- Anshori, M. dan Iswati, S., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Airlangga Univeristy Press, 2019.
- Arifin, S., *et. al* (ed), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asyhadie, Z., dan Kusuma, R., *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Azhar, M., *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Baro, R., *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Bruggink, J. J. H., *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta.

- Cockburn, J., et. al., Introduction, dalam *Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being: Infrastructure and Economic Growth in Asia*, 2013.
- Collins, D., *The World Trade Organization: A Beginner's Guide*, Oneworld Publications, 2015.
- Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, ed. 4, Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Djamali, R. A., *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.
- Djulaeka dan Rahayu, D., *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Efendi, J. dan Ibrahim, J., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2013.
- Fadjar, A. Mukthie, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013.
- Federal Transit Administration, *Turnkey Experience in American Public Transit: A Status Report*, 1998.

- Friedman, L. M., *The Legal System*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Fuadi, Munir, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- G. H. van Voss dan Tjandra, S., *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Bali: Pustaka Laras, 2012.
- Hadjon, P. M., dan Djatmiati, T. S., *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Hamdi, M. Dan Ismaryati, S., *Metodologi Penelitian Administrasi*, Universitas Terbuka, 2014.
- Hamidi, J, Sugiharto, M.A. dan Ihsan, M., *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Hansen, S., *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Harjono, D. K., *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Edisi Revisi*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2012.
- Hartono, S., *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Himawan, C., *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Gunung Agung, 1980.

- HS, Syarif, Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dan peraturan peraturannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Huse, J.A., Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts, Sweet & Maxwell, 2002.
- Ibrahim, J., Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ilmar, A., Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Prenada Media, 2010.
- Indrati, M. F., Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Is, M. S., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kairupan, D., Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kartika, S. D., et. al., Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Kelsen, H., General Theory of Law and State, New York: Russell & Russel, 1945
- Kurniawan, M., et. al, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Kusumaatmadja, M., Pengantar Hukum Internasional, Bandung: P.T. Alumni, 2003.
- Little, J. S., The Law Library, Volume 88, Princeton University, 1855.
- Lloyd of Hampstead dan Freeman, M.D.A., Lloyd's Introduction to Jurisprudence, English Language Book Society/Stevens, 1958.

- Lubis, S., *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989.
- Lukiyanto, K., *Mandor, Model Kepemimpinan Tradisional Jawa Pada Proyek Konstruksi Era Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Mamudji, Sri., et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Manan, A., *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Manan, B., *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana, 2010.
- Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, 2008.
- Meadows, D. H., *Thinking in Systems*, Hartford: Chelsea Green Publishing, 2008.
- Miharja, M., *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Miharja, M., *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Mulyo, S. S., *Bisnis Konstruksi Dihadang Banyak Persoalan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Mulyo, S. S. dan Santoso, B., *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Neuman, W. L., *Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approach*, London: Sage, 2003.

- Nursadi, H., Sistem Hukum Indonesia, Universitas Terbuka, 2014.
- Parjiono, dkk., *Kebijakan Multilateral dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Poerwadarminta, W. J. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Qamar, N., et. al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), CV Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Rahardjo, S., Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1986.
- Rahardjo, S., Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
- Raharjo, H., Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional, Jakarta: Media Pressindo, 2018.
- Rahayu, D., Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, , 2020.
- Ranggawidjaja, H. R., Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: PT. Mandar Maju, 1998.
- Rawls, J., A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Raz, J., Between Authority and Interpretation: On the Theory of Law and Practical Reason, Oxford: Oxford University Press, 2009.

- Salacuse, J. W., *The Three Laws of International Investment: National, Contractual, and International Frameworks for Foreign Capital*, OUP Oxford, 2013.
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Salim, E., *Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: 1966-1982*, Kanisius, 2005.
- Sembiring, S., *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.
- Sidharta, B. A. (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori hukum, dan Filsafat hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Simanjuntak, E., et. al., *Evaluasi Keterkaitan Investasi dengan Pencapaian Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 2010-2014*, Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2015.
- Simanjuntak, E., et. al., *Peluang Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, 2014.
- Simanjuntak, E., et. al., *Pemantauan Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Kasus Studi: Lima Provinsi di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, 2015.

- Simanjuntak, E., et. Al., Profil Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 2014, Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2015.
- Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981.
- Soekanto, S., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo, I., Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Sumantoro, Hukum Ekonomi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Sumarprihatiningrum, C., Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, HIPSMI, Jakarta.
- Supancana, I. B. R., Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Suparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif V. Pembatasan, Jakarta: Univesitas Al Azhar, 2008.
- Supramono, G., Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suriasumantri, J. S., Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Swantoro, H., Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan kembali, Kencana, Jakarta, 2017.
- Swift, A. Political Philosophy: A beginners' guide for students and political. Cambridge: Polity Press, 2006.

Syah R., A. S. R., Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya, Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Wahyudi, E., et. al., Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

World Trade Organization, *A Handbook on the GATS Agreement: A WTO Secretariat Publication*, Cambridge University Press, 2005.

II. Jurnal

Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Juridica*, Vol. 7 No. 2, 2010.

Awandari, L. P. P., dan Indrajaya, I. G. B., Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 5 No. 12, 2016.

Brotosusilo, A., Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis, dan Cakrawala Sosiologis dari WTO, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26 No. 2, 1996.

Budiyanti, E., *Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Kajian Vol. 22 No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

Butho, Z. A., *Ratifikasi WTO dan Dampaknya Pada Pembangunan dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia (Suatu Tinjauan Ontologis)*, Keadilan Progresif, Vol. 2 No. 2, 2011.

- Fattah, D., Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Vol. 9 No. 2, 2013.
- Gunardi, Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum, Era Hukum, Vol. 8 No. 1, 2005.
- Jazuli, A., Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, JIKH Vol. 12 No. 1, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018.
- Mezak, M. H., Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3, 2006.
- Rahardjo, M. D., *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXII No. 72, 2009.
- Randang, F. B., Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing, Servanda Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 1, 2011.
- Sefriani, *Pengaturan Perdagangan Jasa Internasional Dalam GATS/WTO*, Jurnal Hukum No. 28 Vol. 12, 2005.
- Sen, L. C., dan Wahjoe, O., *Liberalisasi Bidang Jasa dan Tenaga Kerja dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practicioners dan Implementasi Perlindungan Hukumnya bagi Praktisi Medis/Dokter di Indonesia*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2017.

- Sulaiman, Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 9 No. 2, Universitas Malikussaleh, 2014.
- Sunaryo, Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme, *RESPONS*, Vol. 23 No. 1, PPE-Unika Atma Jaya, Jakarta, 2018.
- Wacker, J. G., A definition of theory: research guidelines for different building research methods in operations management, *Journal of Operations Management* Vol. 16, 1998.
- Warouw, A., *GATS dan Regulasi Nasional Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3 No. 4, 2006.
- Xu, J., *WTO Members' Commitments in Education Services*, *International Education Studies*, Vol. 2 No. 2, 2009.

III. Publikasi

- Badan Koordinasi Penanaman Modal – RI, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan II dan Januari – Juni Tahun 2019, https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaraan_pers/Papara_n_Bahasa_Indonesia_TW_2_2019.pdf, diunduh pada 7 Maret 2020.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2020, https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaraan_pers/Papara

n_Bahasa_Indonesia_Press_Release_TW_I_2020.pdf, diunduh pada 17 Juni 2020.

Badan Pusat Statistik, Infografis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019, <https://www.bps.go.id/website/images/Pertumbuhan-Ekonomi-IV-2019-ind.jpg>, diakses pada 15 Juni 2020.

Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019, <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/29/96138ece33ccc220007acbdd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2019.html>, diunduh pada 16 April 2020.

Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional, *Perkembangan Jasa-Jasa dan Posisi Indonesia dalam Perundingan GATS ke Depan*, hlm. 13., https://www.bappenas.go.id/files/4013/5029/3012/9kajian__20090303005257__7.pdf, diakses pada 19 Juli 2020.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja>, diunduh pada 5 Maret 2020.

Nurmawati, M., dan Atmaja, I. G. M. W., Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang-Undangan – Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017,

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/21d72bd373564110789e3846d9e74f45.pdf, diunduh pada 1 Juli 2020.

Tilak, J. B. G., Trade in Higher Education. The Role of General Agreement on Trade in Services, UNESCO, Paris, International Institute for Educational Planning, 2011, <http://www.iiep.unesco.org/en/trade-higher-education-role-general-agreement-trade-services-gats-9582>, diunduh pada 12 Juli 2020.

Tim Penyusun Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Diplomasi Ekonomi dalam Konteks Transfer/Alih Teknologi Bagi Pekerja Indonesia, Policy Paper, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2019, <https://kependudukan.lipi.go.id/id/publikasi/naskah-kebijakan/file/67-makalah-kebijakan-diplomasi-ekonomi-dalam-konteks-transfer-alih-teknologi-bagi-pekerja-indonesia>, diunduh pada 29 Juni 2020.

IV. Website/Internet

Aldin, I. A., Pemerintah Kaji Investor Asing Jadi Mayoritas di Proyek Infrastruktur, Katadata, 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/09/27/pemerintah-kaji-investor-asing-jadi-mayoritas-di-proyek-infrastruktur>, diakses pada 17 Juni 2020.

Amir, S., Banyak Perusahaan Asing Tak Terapkan Alih Teknologi Bagi Pekerja Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2020,

<http://kependudukan.lipi.go.id/en/berita/liputan-media/890-banyak-perusahaan-asing-tak-terapkan-alih-teknologi-bagi-pekerja-indonesia>, diakses pada 1 Juli 2020.

Ardiansyah, B. G., *Siapkah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan*, Kementerian Keuangan, 2014, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/siapkah-indonesia-menghadapi-liberalisasi-perdagangan/>, diakses pada 20 Juli 2020.

Bayu, M. R., Pekerja Asing Bantu Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Konstruksi, Liputan6, 10 September 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4059130/pekerja-asing-bantu-penuhi-kebutuhan-tenaga-kerja-di-sektor-konstruksi>, diakses pada 29 Juni 2020.

CNBC Indonesia, Tenaga Kerja Asing di RI Meroket 38%, Terbanyak dari China!, 8 September 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190908075511-4-97843/tenaga-kerja-asing-di-ri-meroket-38-terbanyak-dari-china>, diakses pada 25 Mei 2020.

Databoks, Sepanjang 2018 Terjadi 1.500 Kasus Pelanggaran Tenaga Kerja Asing, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/sepanjng-2018-terjadi-1500-kasus-pelanggaran-tenaga-kerja-asing>, diakses pada 2 Juli 2020.

Gumiwang, R., Apakah Jumlah Tenaga Kerja Asing Berkorelasi dengan Pengangguran?, Tirto.id, 25 Maret 2019, <https://tirto.id/apakah-jumlah-tenaga-kerja-asing-berkorelasi-dengan-pengangguran-djQP>, diakses pada 28 Mei 2020.

Hastuti, H., Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia, Jakarta, 2005, <https://www.bphn.go.id/data/documents/22Penelitian%20TENAGA%20KERJA%20ASING.pdf>, diunduh pada 22 April 2020.

Humas LIPI, Pendekatan Sejarah untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia, 2019, <http://lipi.go.id/berita/single/Pendekatan-Sejarah-untuk-Pembangunan-Ekonomi-Indonesia/21620>, diakses pada 3 Juni 2020.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), 2019, <https://kppip.go.id/>.

Pidato Presiden, Jokowi Sampaikan 5 Program Kerja Utamanya di Masa Mendatang, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/173617165/pidato-presiden-jokowi-sampaikan-5-program-kerja-utamanya-di-masa-mendatang?page=all>, diakses pada 7 Maret 2020.

Prasetyo, A., Peran Asing Harus Lebih Besar dalam Pembangunan Infrastruktur, Media Indonesia, 7 Oktober 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/263783-peran-asing->

harus-lebih-besar-dalam-pembangunan-infrastruktur, diakses pada 16 Juni 2020.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), <https://www.bappenas.go.id/>.

Redaksi Museumberjalan.id, Analisis Dampak Penjajahan Belanda Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Indonesia, 2019, <https://museumberjalan.id/situs/analisis-dampak-penjajahan-belanda-terhadap-pembangunan-infrastruktur-dan-sumber-daya-manusia-di-indonesia/>, diakses pada 5 Juni 2020.

Rundjan, R., Menilik Kembali Riwayat Pekerja Asing di Indonesia, DW, 2018, <https://www.dw.com/id/menilik-kembali-riwayat-pekerja-asing-di-indonesia/a-44964165>, diakses pada 19 Mei 2020.

Sari, E. V., Jokowi Ganti Istilah MP3EI Karena Berbau Politis, CNN Indonesia, 2014, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141218132635-92-19063/jokowi-ganti-istilah-mp3ei-karena-berbau-politis>, diakses pada 12 Juni 2020.

Schaefer, D., "A Theory of Justice" by John Rawls, Part 5 in Arc's Series, The Greatest Works in Philosophy, 2017, <https://arcdigital.media/a-theory-of-justice-by-john-rawls-e71ea5df44f2>, diakses pada 25 Maret 2020.

Syahmardan, Tenaga Kerja Asing di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2011, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020.

Triyono, Gerakan Buruh Dalam Pusaran Tenaga Kerja Asing, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2019, <http://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/employment/797-gerakan-buruh-dalam-pusaran-tenaga-kerja-asing>, diakses pada 1 Juli 2020.

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, hlm. xiii, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf, diakses pada 9 Juni 2020.

World Trade Organization, <https://www.wto.org/>.

V. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan
Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka
Penanaman Modal Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara
Republik Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber
dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan
Usaha Jasa Konstruksi Asing

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2025

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.247/MEN/X/2011 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh
Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang
Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang
Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Warga Negara Asing Pendetang

Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

TAP MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan
Landasan Ekonomi

Regerings Reglement 1854